

PROBLEM SOSIOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, ARAB SAUDI DAN BEBERAPA SOLUSI

Ma'ruf

*Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Bhakti Wanita
Indonesia (YPBWI) Surabaya, Jln. Manukan Lor II/44 Surabaya,
makrufrijal@gmail.com*

Abstract: *This paper aims to describe the Islamic education system in Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, sociological issues, and alternative solutions. The method used is library research. Study results: Institutions of Islamic education in Indonesia: Islamic boarding schools, madrassas, Islamic higher education, and non-formal Islamic educational institutions. Sociological problems: misorientation, emphasis on intellectual, verbalistic and centralistic, exclusive, dichotomous, mechanical, methodological and pedagogical crises, depending on government education patterns and issues of relevance. The solution: needed concepts that clarify the basic ambivalence of philosophy, objectives, methods, and curriculum of Islamic education; reformulation of Islamic sciences; creating a more future-oriented education; institutional reconstruction; methodological innovation; fostering research enthusiasm; and integration of Islamic education with general education. Islamic education in Pakistan is divided into three: Quranic School; Mosque Primary School; and Madrasa. Sociological problems: poverty; regional disparity; gender discrimination; lack of work skills education; fund; lack of professional teachers; verbalistic; centralistic; exclusive; dichotomous; crisis methodology; and indoctrinative. Solution: increase cooperation with Islamic countries; integration of Islamic education and general education; Increasing teacher and cleric competency; Campaign for equal rights to education; and Increasing the cost of education. Islamic education in Saudi*

Arabia includes levels: Basic Education, Further Education: general, religious, and technical; College. Its sociological problems: the Sunni clash with the Shiites; teacher domination; gender disparity; and dichotomous problems. The solution: ijtihad ulama 'Islam across countries helps Saudi Arabia formulate an Islamic education system; and cooperation between Islamic countries.

Keywords: Sociological Problems, Islamic Education, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia.

Pendahuluan

Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia.¹ Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia. Oleh karena itu menurut Muqowim “semua kebijakan praktek pendidikan sedapatnya memperhatikan hakikat manusia sebagai makhluk yang unik dan multidimensional, baik sebagai makhluk Tuhan dengan fitrah yang dimiliki, sebagai makhluk individu yang khas dengan berbagai potensinya, dan sebagai makhluk sosial yang hidup dalam realitas sosial yang majemuk.”²

Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa maju mundurnya peradaban suatu masyarakat ditentukan oleh bagaimana pendidikan berlangsung di masyarakat tersebut, termasuk masyarakat muslim. Oleh karena itu agama Islam berkembang pesat di seluruh penjuru dunia tidak lain hanyalah melalui proses pendidikan, bukan karena faktor heriditas

¹ Hujair Sanaky A.H. “Pendidikan Islam di Indonesia, Suatu Kajian Upaya Pemberdayaan.” *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan* Vol. 13 No. 1 (2008), hal.1.

² Muqowim, “Menggagas Pendidikan Islam Transformatif: Upaya Mewujudkan Kesadaran Profetik dalam Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 1, No. 1 Mei - Oktober (2004), hal. 82.

dan juga bukan karena wahyu, hanya kepada para Nabi Islam diterima melalui wahyu.

Tujuan pendidikan Islam membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh-suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta. Oleh karena pendidikan Islam bertujuan mengembangkan individu sepenuhnya maka sudah sewajarnya dalam memahami hakikat pendidikan Islam harus bertumpu pada pemahaman konsep manusia menurut pandangan Islam.

Islam meletakkan kedudukan manusia sebagai Khalifah Allah di bumi (Al-Baqarah: 30). Inti makna khalifah adalah orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin alam. Manusia bertugas memelihara dan memanfaatkan alam guna mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Untuk itu manusia harus memiliki potensi dan kemampuan yang menopangnya, baik jasmani maupun rohani. Potensi jasmani meliputi seluruh organ jasmaniah yang berwujud nyata. Sedangkan potensi rohaniah bersifat spiritual yang terdiri dari fitroh, roh, kemauan bebas dan akal. Potensi menjadi kemampuan aktual hanyalah melalui proses pendidikan.

Dimensi potensi spiritual manusia meliputi: akidah, akal, akhlak, perasaan (hati), keindahan, dan sosial. Selain itu al-Qur'an menjelaskan juga tentang potensi rohaniah lainnya, yakni *al-Qalb*, '*Aqlu An Ruh*, *an-Nafs*. Bermodalkan potensi itulah manusia merealisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi yang bertugas untuk memakmurkannya.³

³ Zakiyah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990). Hal. 39

Di sisi lain, di samping manusia berfungsi sebagai khalifah, juga bertugas untuk mengabdikan kepada Allah (Az-Zariyat: 56). Oleh karena itu manusia mempunyai fungsi ganda, sebagai khalifah sekaligus sebagai 'abd. Sebagai khalifah tertuju kepada pemegang amanah Allah untuk penguasaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian alam yang berujung kepada pemakmurannya. Fungsi 'abd tertuju kepada penghambaan diri semata-mata hanya kepada Allah. Untuk menciptakan kedua fungsi tersebut secara terintegrasi diperlukan pendidikan Islam yang komprehensif.

Negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim terus menumbuh kembangkan kebijakan pendidikan Islam agar menghasilkan lulusan yang mampu menjalankan fungsi ganda tersebut, namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai problematika. Muhaimin⁴ mendeskripsikan permasalahan pendidikan Islam: 1) sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta; 2) usaha pembaharuan sering bersifat sepotong-sepotong sehingga tidak terjadi perubahan secara esensial di dalamnya; 3) cenderung berorientasi ke masa silam; dan 4) sebagian besar belum dikelola secara profesional.

Berbagai masalah tersebut selain di Indonesia kiranya juga dialami di beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti Pakistan dan Arab Saudi. Oleh karena itu membutuhkan jawaban secara komprehensif, melibatkan pakar-pakar pendidikan Islam, didukung secara total oleh pemerintah dan seluruh umat Islam di negara masing-masing.

⁴ Dalam Pendi Susanto. "Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. IV No. 1, (Juni 2015), hal. 71-93. <https://DOI:10.14421/jpi.2015.41.71-93>

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah penulisan ini adalah “Bagaimana sistem pendidikan Islam di Indonesia, Pakistan, dan Arab Saudi, apa saja masalah-masalah sosiologisnya, dan bagaimana alternatif solusinya?”

Ruang lingkup pembahasan penulisan ini dibatasi pada masalah sosiologis pendidikan Islam di ke tiga Negara tersebut. Acuanya pandangan Nasution⁵ yang mengartikan sosiologi pendidikan Islam sebagai spesialisasi ilmu sosiologi yang mengkaji sikap dan tingkah laku masyarakat yang terlibat dalam pendidikan Islam. Ruang lingkupnya meliputi: hubungan antara lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat; hubungan antar manusia dalam lembaga pendidikan Islam; pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah; pengaruh lembaga pendidikan Islam terhadap masyarakat; dan lembaga pendidikan Islam dalam masyarakat.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research*. Tujuannya memdeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah sosiologis pendidikan Islam di Indonesia, Pakistan, dan Arab Saudi serta mengajukan beberapa alternatif solusi. Menurut Mukhtar⁶ penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari studi kepustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia

⁵ Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 2-4.

⁶ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hal. 6.

sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada dalam kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Islam di Indonesia

Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren. Ada beberapa elemen pesantren yang membedakan dengan lembaga lainnya, yaitu: pondok: tempat menginap para santri; santri: peserta didik; masjid: sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren; kyai: tokoh atau sebutan seseorang yang memiliki kelebihan dari sisi agama, dan kharisma yang dimilikinya; kitab kuning: sebagai referensi pokok dalam kajian keislaman.⁷

Menurut Ziemek (1986)⁸ tipe-tipe pesantren di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa tipe. Pesantren tipe A, masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, sistem pendidikan tidak mengalami transformasi yang berarti, masih tetap eksis mempertahankan tradisi-tradisi pesantren klasik dengan corak keislamannya. Masjid untuk pembelajaran agama selain tempat salat. Sarana fisik terdiri dari masjid dan rumah kyai. Pesantren tipe B, Sarana fisik: masjid, rumah kyai, pondok yang disediakan bagi para santri sekaligus menjadi ruangan belajar. Pesantren ini merupakan ciri pesantren tradisional. Sistem pembelajaran *sorogan*, *bandungan*, dan *wetonan*. Pesantren tipe C adalah

⁷ Dhofier (1982) dalam Imam Syafe'i. "Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No I (2017).

⁸ Guntur Cahaya Kesuma. "Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini". *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* 02 (1) (2017), hal 67-79. DOI: 10.24042/tadris.v2i1.1740.

pesantren salafi dan lembaga sekolah yang merupakan karakteristik pembaharuan dalam pendidikan Islam, namun tidak menghilangkan sistem pembelajaran yang asli yaitu sistem *sorogan*, *bandungan*, dan *wetonan*. Pesantren tipe D merupakan pesantren modern, terbuka untuk umum, corak pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaannya. Sudah menggunakan sistem modern dan klasikal. Jenjang pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pesantren tipe E, pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal tetapi memberikan kesempatan kepada santri untuk belajar pada jenjang pendidikan formal di luar pesantren. Pesantren tipe ini dapat dijumlah pada pesantren salafi. Pesantren tipe F dikenal sebagai *ma'had 'Aly*, tipe ini, biasanya ada pada perguruan tinggi agama. Mahasiswa di asramakan dalam waktu tertentu. Mahasiswa yang tinggal di asrama wajib mentaati peraturan-peraturan yang dibuat perguruan tinggi.

Lembaga pendidikan Islam berikutnya adalah madrasah, sistem pendidikan di madrasah serupa dengan sistem sekolah umum di Indonesia. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan telah tercantum dalam daftar pelajaran yang telah diuraikan dari kurikulumnya. Menurut Fatoni⁹ madrasah memiliki komposisi kurikulum 30 persen mata pelajaran agama sedangkan selebihnya 70 persen mata pelajaran umum. Secara kelembagaan madrasah dibawah pembinaan Kementerian Agama. Jenjang madrasah serupa dengan sekolah terdiri: ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Dalam sistem pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan madrasah diakui setaraf dengan standar kompetensi lulusan sekolah. Oleh

⁹ M.K Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 64

karena itu pembinaan pendidikan mata pelajaran umum menjadi tanggung jawab Kemendiknas sedangkan mata pelajaran agama menjadi tanggung jawab Kemenag.

Lembaga pendidikan islam berikutnya adalah pendidikan tinggi Islam, sampai penulisan ini meliputi 20 IAIN, 22 STAIN, dan 11 UIN, sedangkan swasta ada 64 universitas Islam, 28 institut, dan lebih 200 sekolah tinggi Islam se Indonesia. Lembaga ini wajib membelajarkan Islam kepada mahasiswanya.

Berikutnya adalah lembaga pendidikan Islam non formal. Berdasarkan Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas lembaga tersebut terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis termasuk kelompok-kelompok pengajian Islam di masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi lembaga pendidikan non formal Islam jika memasukkan kajian Islam sebagai salah satu kajiannya.

Masalah Sosiologis Pendidikan Islam (PAI) Indonesia

Masalah sosiologis PAI di Indonesia antara lain:

1. Misorientasi, kiblat pendidikan Islam masih berorientasi ke “Barat” belum sepenuhnya disandarkan kepada telaah *filosofis antropologis* yang menjadikan al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas sebagai dasarnya.
2. Model pembelajaran masih menekankan kepada pendekatan intelektual verbalistik, sentralistik (*berpusat pada ustad*).
3. Eklusif dan dikhotomis.
4. Mekanik, terseret arus ideologi kapitalisme-liberalisme sehingga memandang pendidikan sebagai investasi, pengembangan fakultas dan

program studi mengacu pada kebutuhan tenaga kerja. Sistematisa jurusan di beberapa fakultas dan program studi di IAIN dan PTAI lain kurang memiliki dasar teoriterial keilmuan tertentu dan kurang relevan dengan dunia objektif umat.¹⁰

5. Krisis metodologi dan krisis paedagogik, yang terjadi lebih ke *teaching process* bukan *learning process*.
6. Terlalu tergantung pada pola pendidikan yang digariskan pemerintah, yakni pendidikan untuk menopang program pembangunan¹¹.
7. Penggunaan pemikiran Islam klasik, yaitu pemikiran produk masyarakat ratusan tahun lalu yang jauh berbeda dari status sosial di mana pendidikan Islam harus berperan di dalamnya. Akibatnya, setiap materi keislaman ditempatkan dalam susunan kurikulum yang kurang memberi peluang pengembangan daya kritis dan kreatif. Peserta didik tidak dibelajarkan menghadapi tantangan-tantangan masa depan.¹²
8. Relevansi.¹³

Alternatif Solusi

Beberapa alternatif solusi antara lain sebagai berikut.

1. Dibutuhkan konsep yang menjernihkan ambivalensi dasar filsafat, tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam.¹⁴
2. Reformulasi; menumuskan kembali ilmu-ilmu Islam. Persoalan ini tidak sederhana, bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga persoalan-persoalan

¹⁰ Usa dan Wijzan dalam Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pruralisme Budaya dan Politik*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), hal. 166.

¹¹ Siswadi, "Reformasi Sistem Pendidikan Islam di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan INSANIA* Vol. 12, No. 3 Sep-Des (2007), hal 4.

¹² Abdul Munir Mul Khan et al., *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren-Regiusitas IPTEK* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 86.

¹³ Siswadi. "Reformasi Sistem", hal 5.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam, dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1985), hal. 155-156.

yang kadang-kadang sarat dengan ideologis. Shobari¹⁵ menjelaskan bahwa terjadinya proses ideologis terhadap Islam karena menganggap ilmu-ilmu Islam adalah ilmu yang paling tinggi. Sikap ini menyebabkan ilmu-ilmu eksakta terlantarkan.

3. Pengembangan sikap penerimaan kultural yang sadar terhadap perubahan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berorientasi ke masa depan.
4. Rekonstruksi kelembagaan:
 - a. Memantapkan eksistensi UIN sebagaimana mestinya. Berubahnya IAIN menjadi UIN merupakan salah satu upaya rekonstruksi kelembagaan ini, tinggal apakah budaya Universitas sebagai pusat-pusat pengembangan ilmu melalui penelitian sudah benar-benar dibudayakan didalam UIN atau masih sebatas nama tetapi sistem pendidikannya masih berpola Institut yang mengedepankan sisi keterampilan pragmatis.
 - b. Rekonstruksi program studi yang kurang berbasis disiplin keilmuan untuk UIN dan berbasis kebutuhan masyarakat untuk Institut dan sejenisnya.
 - c. Perumusan kembali makna pendidikan. Sesuai dengan pendapat Naquib Al Attas¹⁶ bahwa proses pendidikan Islam yang kita tempuh lebih baik menggunakan istilah ta'dib daripada tarbiyah. Oleh karena ta'dib mengandung proses inkulturasi dan proses pembudayaan selain intelektualisasi.
 - d. Keharusan dilakukan pendekatan dan metoda baru dalam proses kependidikan. Pendidikan harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan berkeselamatan, mengembangkan daya kritis peserta didik,

¹⁵ Siswadi. "Reformasi Sistem.....", hal 5.

¹⁶ Siswadi. "Reformasi Sistem.....", hal 5.

berorientasi pada siswa, ustad lebih sebagai fasilitator, bukan semata transformator ilmu.

- e. Penumbuhan semangat *scientific inquiry* dan ingin tahu pada siswa.¹⁷
- f. Integrasi PAI dan pendidikan umum dalam satu kurikulum di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan Islam.

Pendidikan Islam di Pakistan

Sistem Pendidikan Islam

Pendidikan di Pakistan diawasi oleh Departemen Pendidikan Pemerintah Pakistan serta pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah federal sebagian besar membantu dalam pengembangan kurikulum, akreditasi dan dalam pembiayaan penelitian dan pengembangan. Pasal 25-A Konstitusi Pakistan mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas secara gratis dan wajib untuk anak-anak dari kelompok usia 5 sampai 16 tahun. “Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia 5-16 tahun dengan cara seperti dapat ditentukan oleh hukum.”

Sistem pendidikan di Pakistan yang ada sekarang ini menganut hasil keputusan Komisi Pendidikan Nasional tahun 1959, yaitu pendidikan dasar (*primary education*), usia 6 sampai 11 tahun, terdiri atas tingkat 1 sampai tingkat 5. Jadi pendidikan dasar ditempuh selama 5 tahun. Sekolah lanjutan tingkat pertama (*junior secondary*), usia 12 sampai 15 tahun, terdiri tingkat 6 sampai 8, sedangkan sekolah menengah atas (*secondary high school*) usia 16 sampai 18 tahun terdiri atas tingkat 9 dan 10.

Jenjang sekolah menengah atas ini memiliki 3 jenis sekolah,

¹⁷ Abdul Munir Mul Khan et al., *Rekonstruksi....*, hal 95.

yaitu: Sekolah umum (*general*) sebagai persiapan pendidikan di perguruan tinggi; Sekolah kejuruan (*vocational*); dan Sekolah teknik, sebagaimana di Indonesia yang berorientasi pada pekerjaan.

Pendidikan tingkat 11 dan seterusnya merupakan jenjang perguruan tinggi, seorang siswa harus terlebih dahulu melalui pendidikan sekolah persiapan selama 2 tahun (*higher secondary atau intermediate college*), yaitu pendidikan tingkat 11 dan 12. Khusus untuk memasuki perguruan tinggi yang bersifat kejuruan, para siswa tidak perlu menempuh sekolah persiapan terlebih dahulu.

Untuk jenjang perguruan tinggi sejak pemisahan dengan India tahun 1947, Pakistan hanya memiliki 1 universitas saja, Universitas Punjab di Lahore. Mata kuliah agama diberikan sebagai mata kuliah dasar umum. Universitas ini mendirikan departemen Islamiyah pada tahun 1950. Setelah itu berdiri berbagai perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Sind yang membuka fakultas sejarah dan kebudayaan Islam sejak awal tahun 1950-an.

Dalam hal kurikulumnya lembaga ini dipengaruhi oleh Universitas al Azhar, Mesir. Dalam kajian tradisional-keagamaannya dimasukkan ilmu ekonomi, sejarah, geografi, statistik, dan filsafat.

Hingga 2009, Pakistan menghadapi Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah dasar 66 persen, jauh di bawah rata-rata dunia 90 persen. Selain itu, tingkat melek huruf orang dewasa Pakistan (68%) lebih rendah dari negara-negara seperti Sri Lanka (90,7%), Iran (82,4%), Indonesia (90,4%), Vietnam (90,3%), Mesir (71,4%) dan India (61%) untuk tahun 2007-2008.¹⁸ Kedua hal tersebut mengindikasikan betapa buruknya kualitas pendidikan di Pakistan.

¹⁸ Kementrian Pendidikan Pakistan, 2009: hal. 68.

Kinerja buruk sektor pendidikan di Pakistan terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi publik. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hanya 7 persen dari GNP dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, alokasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi sangat rendah. Lembaga pendidikan yang lebih rendah seperti sekolah dasar menderita dan tidak mendapat subsidi memadai serta pendidikan yang berkualitas dari pemerintah. Akibatnya, Pakistan menjadi salah satu negara yang tingkat melek hurufnya terendah di dunia dan terendah daya saing sumber daya manusianya.¹⁹

Pendidikan Islam di Pakistan terbagi tiga kategori: (a) *Quranic School*; (b) *Mosque Primary School*; dan (c) Madrasah.²⁰ *Quranic School* adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-quran. Tempatnya biasanya di masjid-masjid atau mushalla desa. Waktu belajar tidak teratur dengan jelas. Ada yang pagi, siang dan sore. Ustadz yang mengajar biasanya berasal dari desa tersebut. *Mosque Primary School* adalah sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Inisiatif ini resmi dilakukan oleh pemerintah Ziaul-Haq pada tahun 1980-an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan di sebagian wilayah di Pakistan. Selain belajar al-quran mereka juga diajarkan mata pelajaran bahasa urdu dan matematika oleh imam masjid setempat. Namun pendidikan ini sering terkendala disebabkan para imam jarang menguasai bahasa urdu dan matematika dengan baik, akhirnya kebanyakan sekolah gulung tikar. Sekarang jumlah *Mosque Primary School* di seluruh Pakistan sekitar 25.000 buah sekolah.

¹⁹ Ghulam Rasool Memon 2007 dalam Surawardi, "Pendidikan Islam di Pakistan." *Jurnal: Management of Education*, Volume 1, (2014), hal. 44.

²⁰ Uzma Anzar 2003 dalam Surawardi, "Pendidikan....", hal. 48.

Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indo-nesia. Di Indonesia para santri tidak diwajibkan untuk menghafal Alquran seluruhnya, kecuali pesantren tersebut pesantren *hifzul* al-quran. Di Pakistan madrasah mewajibkan kepada murid-muridnya untuk menghafal al-quran 30 juz sebelum belajar materi-materi lain dengan pemikiran karena al-quran merupakan asas bagi pelajar yang ingin mendalami ilmu agama.

Ada lima aliran besar pemikiran (*school of Thought*) di madrasah Pakistan: *Deobandi*, *Barelwi*, *Ahli Hadits*, *Salafi* dan *Syiah*. Tiap-tiap aliran pemikiran mempunyai metode pembelajaran yang berbeda. Tapi, *Deobandi* dan *Barelwi* adalah dua aliran pemikiran yang paling dominan di seluruh madrasah Pakistan.

Masalah Sosiologis Pendidikan Islam

Pakistan sebagai negara Islam yang berkembang memiliki beberapa masalah pendidikan. Menurut data dari UNESCO, penyelesaian studi pada pendidikan dasar di Pakistan 33.8% pada wanita dan 47.18% pada laki-laki.²¹ Hal ini menunjukkan tingkat kelulusan pendidikan dasar di Pakistan sangat rendah.

Setidaknya ada 6 masalah pokok yang menjadi persoalan pendidikan di Pakistan. Masalah-masalah tersebut yaitu: kemiskinan; kesenjangan antar daerah; diskriminasi gender; kurangnya pendidikan yang bersifat teknis, sehingga banyak lulusan yang tidak mempunyai *skill* yang mumpuni; kurangnya alokasi dana; kurangnya tenaga pendidik atau guru yang professional.²² Masalah-masalah tersebut tentunya dapat

²¹ "Pakistan Education: Problem and Solution of Pakistan Education," <http://www.einfopedia.com> (diakses 8 Januari 2019)

²² "Pakistan Education:..... (diakses 8 Januari 2019).

mempengaruhi pendidikan Islam karena semua lembaga pendidikan di Pakistan wajib membelajarkan Islam kepada peserta didiknya.

Khusus tentang pendidikan Islam, masalahnya relatif sama dengan masalah pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: verbalistik; sentralistik (*berpusat pada ustad*); dikhotomis; krisis metodologi; krisis paedagogik; dan indoktrinatif. Sedangkan di Pakistan ada masalah deskriminasi gender dimana perempuan belum memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dengan pria dan masalah kemiskinan, sedangkan di Indonesia kedua masalah terakhir itu tidak dijumpai.

Alternatif Solusi

1. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara Islam. Bersumber dari masalah kemiskinan menyebabkan pendidikan Islam di Pakistan tidak dapat berkembang, baik dilihat dari APK, tingkat kelulusan, sarana-prasarana pendidikan, jumlah dan kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan kerjasama sesama negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk mendapatkan dukungan dana, tenaga ahli, dan lainnya.
2. Integrasi PAI dan pendidikan umum dalam satu kurikulum di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan Islam.
3. Peningkatan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik para ustad Masjid pada Mosque Primary School dan Madrasah.
4. Kampanye persamaan hak memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki.
5. Peningkatan biaya pendidikan.

Pendidikan Islam di Arab Saudi

Sistem Pendidikan Islam

Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki

dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama: 1) Pendidikan umum untuk laki-laki; 2) Pendidikan umum untuk perempuan; dan 3) Pendidikan Islam untuk laki-laki.

Untuk pendidikan umum, baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Pendidikan umum dibagi menjadi 4 bagian: Pendidikan Dasar yang terdiri dari SD (6-12 tahun); Pendidikan Menengah (12 – 15 tahun); Pendidikan Sekunder (15-18 tahun); dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota dewan ulama. Kurikulum untuk sekolah Islam tradisional juga sebagian menggunakan kurikulum pendidikan umum, tetapi fokusnya pada Studi Islam dan Bahasa Arab. Untuk pendidikan agama, dilakukan di bawah supervisi dari Universitas Islam Imam Saud (Riyadh) dan Universitas Islam Madinah (Madinah). Namun demikian, di universitas-universitas umum, pelajaran agama Islam merupakan mata kuliah wajib apapun jurusan yang diambil mahasiswa.

Sistem Pendidikan di Arab Saudi terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan sekunder, dan pendidikan tinggi. Rinciannya sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar (*Primary Education*), terdiri dari:

1) Sekolah Dasar

Durasi: 6 tahun (umur 6-12 tahun)

Pelajaran wajib: bahasa arab, seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga (khusus perempuan), matematika, pendidikan fisika (khusus laki-laki), studi Islam, dan sains.

2) Sekolah Menengah

Durasi: 3 tahun (umur 12-15 tahun)

Pelajaran wajib: bahasa arab, seni, bahasa inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah (khusus perempuan), matematika, pendidikan fisika (khusus laki-laki), studi Islam, dan sains.

b. Pendidikan Lanjutan (*Secondary Education*), terdiri dari:

1) Pendidikan Lanjutan Umum

Durasi: 3 tahun (umur 15-18 tahun).

Pelajaran wajib: selama tahun pertama mendapat pelajaran umum yang sama, 2 tahun terakhir dibagi menjadi sains dan sosial (*literacy*). Siswa yang mempunyai grade 60% atau lebih boleh memilih keduanya, sedangkan yang kurang 60% harus memilih sosial.

Pelajaran umum: Bahasa arab, biologi, kimia, bahasa inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga (khusus perempuan), matematika, pendidikan fisika (khusus laki-laki), dan pendidikan agama.

2) Pendidikan Lanjutan Agama

Durasi: 3 tahun (umur 15 - 18 tahun).

Bahasa arab dan literature, bahasa Inggris, kebudayaan umum, geografi, sejarah, dan pendidikan agama.

3) Pendidikan Lanjutan Teknik

Ada tiga tipe pendidikan lanjutan teknik yaitu teknikal, komersial, dan agrikultural. Durasi: 3 tahun (umur 15-18 tahun).

Kurikulum:

- 1) *Teknikal*: gambar arsitektur, otomotif, elektrikal, mekanika mesin, mekanika metal, radio dan televisi. Dengan pelajaran tambahan bahasa Arab, kimia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan fisika, fisika, dan pendidikan agama.

- 2) *Komersial*: bahasa Arab, akuntansi dan pembukuan, korespondensi komersial, ekonomi, bahasa Inggris, matematika ekonomi, matematika umum, geografi, manajemen dan kesekretariatan, dan pendidikan agama.
- 3) *Agrikultural*: ekonomi agrikultur, agronomi, perkebang-biakan hewan, biologi terapan, kimia terapan, matematika terapan, fisika terapan, bahasa Arab, bahasa Inggris, manajemen pertanian dan lahan, hortikultura, pendidikan agama, pemasaran, dan nutrisi pangan.

c. Pendidikan Tinggi (*Higher Education*)

Jenis perguruan tinggi di Arab Saudi meliputi universitas, institut untuk perempuan, institut administrasi publik dan institut keguruan. Semua universitas berada di bawah supervisi Kementerian Pendidikan Tinggi kecuali Universitas Islam Madinah, Universitas terbaik di Arab Saudi untuk pendidikan agama Islam, yang berada di bawah supervisi Dewan Menteri.

1) Universitas

- a) Untuk pendidikan tinggi universitas, tingkatannya sama seperti universitas pada umumnya, yaitu: Strata 1 (Bachelor), Strata 2 (Master), dan Strata 3 (Doctor).
- b) Ada dua jalur untuk S2, dengan tesis (*by thesis*) atau dengan kuliah (*by course*). Apabila mahasiswa mengambil jalur tesis, maka setelah menyelesaikan matakuliah yang sudah ditentukan, ia harus menyelesaikan tesis kurang lebih selama satu tahun, sedangkan untuk jalur kuliah, mahasiswa hanya perlu menyelesaikan seluruh mata kuliah yang telah ditentukan dengan jumlah mata kuliah yang lebih banyak.

- c) Untuk S3, lama waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun setelah menyelesaikan S2. Untuk S3, mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah dan menyusun disertasi yang merupakan hasil riset independen yang telah dilakukan. Selain itu, tambahan syarat kadang-kadang diperlukan, seperti: minimal mempublikasikan jurnal internasional atau konferensi internasional.
- 2) Non Universitas
- a. *Technical College*
- Pendidikan tinggi ini setara dengan diploma yang harus diselesaikan selama 3 tahun. Bidang-bidang yang tersedia: control otomatis, sistem elektrikal otomatis, otomotif, perlengkapan elektrik, instalasi elektrik, kimia industri, elektronik industri, dan teknik produksi.
- b. *Higher Technical Institute*
- Pendidikan ini seperti layaknya D1 yang dapat diselesaikan selama 1 tahun.
- c. *Higher Technical Institutes for Financial and Commercial Science*
- Pendidikan tinggi ini khusus untuk ilmu keuangan dan komersial. Kurikulum yang tersedia adalah: akuntansi, korespondensi komersil dan bisnis, bahasa inggris, asuransi, kebudayaan Islam, pemasaran dan periklanan, pembelian dan inventori, dan kesekretariatan. Lama pendidikan 2 tahun.
- d. *The Institute of Public Administration*
- Lama studi untuk jenis pendidikan tinggi ini adalah selama 2 sampai 3 tahun. Bidang-bidang yang tersedia adalah:

perbankan (2 tahun), pemrosesan data elektronik (2.5 tahun), administrasi rumah sakit (2 tahun), ilmu kepustakaan (3 tahun), ilmu personal (2 tahun), ilmu kesekretariatan (2 tahun), dan ilmu pergudangan (2 tahun).

e. *Teacher Training College*

Untuk pendidikan keguruan terbagi menjadi 3 jurusan: guru sekolah dasar dan menengah pertama (*primary school*), guru sekolah menengah atas (*secondary school*), dan guru pendidikan lanjut (*higher education*).

Masalah Sosiologis PAI di Arab Saudi

1. Masalah pertentangan antara kaum Sunni sebagai kelompok mayoritas mencapai 90% umat Islam di Arab Saudi dengan kelompok Syi'ah yang hanya 10%. Masalah perbedaan paham antara kedua kelompok ini berimplikasi pada pendidikan Islam di Arab Saudi. Lembaga pendidikan Islam Sunni yang didukung penuh kerajaan enggan menerima siswa kaum syi'ah, dan demikian sebaliknya. Pendidikan Islam yang telah berabad-abad di Arab Saudi terbukti belum dapat menyatukan kedua paham tersebut demi persatuan dan kejayaan Islam.
2. Masalah dominasi guru. Guru masih banyak yang menerapkan *teacher-centre-system of education*. Guru menuntut siswa patuh dan taat untuk mengikuti perintahnya. Interaksi guru-siswa tidak memungkinkan berkembangnya kreativitas dan kebebasan siswa untuk mengembangkan potensinya.
3. Masalah disparitas gender. Anak-anak perempuan di Arab Saudi kebanyakan memperoleh pendidikan secara privat di rumah guru Al-Qur'an. Pendidikan untuk anak perempuan kebanyakan bertujuan

untuk mempersiapkan mereka menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Setelah memasuki masa puber, mereka sudah tidak diperkenankan belajar secara privat. Dalam perkembangannya, setelah Abdul Azis menjadi Raja, anak-anak perempuan diperkenankan mengikuti pendidikan formal dalam kelas sesama perempuan. Mereka juga diperkenankan belajar sampai perguruan tinggi, namun interaksi dosen lelaki-mahasiswi dilakukan melalui layar monitor. Pertanyaan mahasiswi ke dosen lelaki dilakukan melalui telephon.

4. Masalah dikhotomis agama dan pengetahuan umum. Meskipun saat ini Arab Saudi memiliki perguruan tinggi yang mampu mengalahkan seluruh PT di Indonesia, yakni King Saud University, yang telah berada pada peringkat 20 PT terbaik se Asia dan peringkat 200 PT sedunia, namun integrasi pengetahuan umum ke ajaran Islam masih sangat terbatas.

Ditinjau dari setiap jenjang pendidikan, masalah-masalah pendidikan Islam di Arab Saudi menurut Idris²³ antara lain: 1) di TK dijumpai masalah kurang kerja samanya antara wali murid dengan pihak TK.; 2) di SD, masalah putus sekolah; 3) di SMP masalah buku ajar, mata pelajaran akidah islamiyah belum mampu membimbing anak didik untuk berkepribadian muslim; 4) di SMA, sekolah belum berhasil mendidik anak didik untuk menghayati dan mengamalkan akidah islamiyah. Hal ini juga berhubungan dengan Sekolah yang masih belum berhasil membina anak didik untuk loyal kepada negara dan bangsa. Kendala lainnya adalah sebagian guru mengajar materi ajar dengan

²³ Tasnim Idris. "Pendidikan Agama Islam di Mekah dan Serambi Mekah". *Jurnal Mudarrisuna*, Volume 3, No.1, Januari-Juni (2013), hal. 202-203.

metode yang tidak dapat mengembangkan cara berpikir anak didik. Ditemukan juga bahwa sebagian anak didik yang *drop out* dari sekolah akan menjadi penganggur dan pengacau keamanan.

Alternatif Solusi

Diperlukan kerja keras ulama-ulama Islam Sunni ternama di dunia untuk membantu Arab Saudi dalam merumuskan sistem pendidikan Islam melalui *ijtihad*. Hanya dengan *ijtihad* dan keterbukaan sikap pemimpin kerajaan anak-anak perempuan Arab Saudi akan memperoleh hak dan layanan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki. Dengan *ijtihad* akan ditemukan integrasi pengetahuan umum dengan ajaran Islam di semua jenjang pendidikan formal Arab Saudi.

Masalah kurang profesionalnya guru dalam mendidik dapat diatasi dengan kerjasama antar negara Islam dalam peningkatan profesionalisme guru dan penyiapan tenaga guru.

Simpulan

1. Pendidikan Islam adalah upaya mewariskan nilai-nilai keislaman kepada generasi penerus, bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, menumbuh-suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta.
2. Kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia meliputi pondok pesantren, madrasah, Perguruan Tinggi Islam, dan lembaga pendidikan Islam non formal. Masalah sosiologis pendidikan Islam antara lain: misorientasi, pembelajaran masih menekankan pendekatan intelektual verbalistik dan sentralistik, eksklusif, dikhotomis, mekanik, krisis metodologi dan krisis paedagogik, terlalu

tergantung pada pola pendidikan pemerintah, serta masalah relevansi. Alternatif solusinya: 1) dibutuhkan konsep yang menjernihkan ambivalensi dasar filsafat, tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam; 2) reformulasi ilmu-ilmu Islam; 3) menciptakan pendidikan yang lebih berorientasi ke masa depan; 4) rekonstruksi kelembagaan; 5) inovasi metodologis; menumbuhkan semangat riset; dan 6) integrasi PAI dan pendidikan umum.

3. Pendidikan Islam di Pakistan terbagi tiga kategori: 1) *Quranic School*; 2) *Mosque Primary School*; dan 3) Madrasah. Pakistan sebagai negara Islam yang berkembang memiliki beberapa masalah sosiologis pendidikan Islam, yaitu: faktor kemiskinan; kesenjangan antar daerah; diskriminasi gender; kurangnya pendidikan yang bersifat keterampilan kerja; kurangnya alokasi dana; kurangnya guru profesional; verbalistik; sentralistik; eksklusif; dikhotomis; krisis metodologi dan paedagogik; serta indoktrinatif. Sebagai solusi: 1) peningkatan kerjasama dengan negara-negara Islam; 2) integrasi PAI dan pendidikan umum; 3) Peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik para ustad; 4) Kampanye persamaan hak memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki; dan 5) Peningkatan biaya pendidikan.
4. Pendidikan Islam di Arab Saudi meliputi jenjang: 1) Pendidikan Dasar; 2) Pendidikan lanjutan, terdiri dari sekolah umum, agama, dan teknik; serta (3) Perguruan Tinggi, meliputi: Universitas dan Non Universitas. Semua lembaga pendidikan wajib membelajarkan agama Islam meskipun muatan kurikulumnya berbeda-beda. Problem sosiologisnya meliputi: 1) pertentangan kaum Sunni sebagai kelompok mayoritas dengan kelompok Syi'ah; 2) Dominasi guru; 3)

disparitas gender; dan 4) masalah dikhotomis. Sebagai solusi: 1) diperlukan kerja keras ulama-ulama Islam Sunni ternama di dunia untuk *ijtihad* membantu Arab Saudi dalam merumuskan sistem pendidikan Islam; 2) Diperlukan kerjasama antar negara Islam dalam peningkatan profesionalisme guru dan penyiapan tenaga guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Nadwi, Abul Hasan. *Pendidikan Islam yang Mandiri*, alih bahasa Afif Muhammad. Cet. I; Bandung: Dunia Ilmu. 1987.
- Fathoni, M. K. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2005.
- Idris, Tasnim. "Pendidikan Agama Islam di Mekkkah dan Serambi Mekkah". *Jurnal Mudarrisuna*, Volume 3, No.1, (Januari-Juni, 2013).
- Kesuma, Guntur Cahaya "Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini". *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* 02-1 (2017). <https://DOI:10.24042/tadris.v2i1.1740>
- Muqowim, "Menggagas Pendidikan Islam Transformatif: Upaya Mewujudkan Kesadaran Profetik dalam Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 1, No. 1 Mei - Oktober (2004).
- Mulkhan, Abdul Munir, dkk. *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren-Regiusitas IPTEK*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Nasution. Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- National Education Policy*. Ministry of Education Government of Pakistan, 2009
- Rahman, Fazlur. *Islam, dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Sanaky, Hujair A.H. Pendidikan Islam di Indonesia, Suatu Kajian Upaya Pemberdayaan. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan* Vol. 13 No. 1. (1998).
- Siswadi, "Reformasi Sistem Pendidikan Islam di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan INSANIA* Vol. 12, No. 3 (September-Desember 2007).
- Susanto, Pendi. "Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. IV No. 1, (Juni 2015), hal. 71-93. <https://DOI:10.14421/jpi.2015.41.71-93>
- Surawardi. "Pendidikan Islam di Pakistan." *Jurnal: Management of Education, Volume 1, Issue 1*, (2014).

Syafe'I, Imam. "Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter."
Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No I (2017).

Tobroni dan Arifin, Syamsul., *Islam Pruralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta:
SIPRESS, 1994.